

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perkembangan PDRB Perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi.**

Untuk mengetahui perkembangan PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 maka digunakanlah rumus perkembangan sehingga dapat diketahui dan dianalisis perkembangan pada setiap variabel penelitian. Adapun hasil analisis perkembangan pada setiap variabel penelitian sebagai berikut:

##### **5.1.1 Perkembangan PDRB Perkapita**

Selama periode 2017 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara menyeluruh. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai rata-rata keseluruhan pada tahun 2017 tercatat sebesar 41,53 ribu rupiah. Angka ini meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni menjadi sekitar 42,94 ribu pada 2018 dan 45,32 ribu pada 2019. Peningkatan tersebut mencerminkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang salah satunya didorong oleh penguatan sektor produksi dan perdagangan lokal. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai rata-rata menjadi 43,81 ribu akibat dampak pandemi COVID-19 yang menekan hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, pada tahun-tahun selanjutnya ekonomi daerah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup kuat. Tahun 2021 mencatat peningkatan menjadi 44,87 ribu, kemudian terus naik menjadi 46,93 ribu pada 2022 dan 48,77 ribu pada 2023. Pemulihan ini semakin nyata pada tahun 2024 dengan capaian rata-rata sebesar 50,78 ribu rupiah. Secara keseluruhan, peningkatan PDRB per kapita dari tahun 2017 hingga 2024 mencapai sekitar 22,3 persen. Apabila dihitung rata-rata pertumbuhan tahunannya, angka tersebut menunjukkan perkembangan sekitar 3,18 persen per tahun. Hal ini menandakan bahwa perekonomian kabupaten/kota di

Provinsi Jambi memiliki daya tahan yang cukup baik dan mampu bangkit secara kolektif pasca-pandemi.

Peningkatan ini juga menjadi indikator bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan ke arah yang progresif. Program-program pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap UMKM memberikan kontribusi terhadap penguatan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pembukaan lapangan kerja juga mendorong produktivitas masyarakat. Secara tidak langsung, hal tersebut memperbesar nilai tambah ekonomi yang tercermin dalam angka PDRB per kapita.

Namun demikian, meskipun tren rata-rata memperlihatkan pertumbuhan yang menggembirakan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah mengalami perkembangan yang merata. Terdapat beberapa kabupaten yang mengalami fluktuasi cukup tajam, baik karena ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, keterbatasan infrastruktur dasar, maupun dampak dari kondisi geografis yang kurang mendukung. Misalnya, beberapa daerah yang mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan daerah lain yang memiliki sektor ekonomi lebih beragam.

Peningkatan PDRB per kapita secara agregat juga perlu dikritisi dalam konteks keadilan pembangunan. Meski nilai rata-rata naik, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kesejahteraan merata di semua kelompok masyarakat. Sebab, bisa jadi pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu atau kelompok pendapatan menengah ke atas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan angka makro, tetapi juga memastikan bahwa distribusi hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Table 5.1 Perkembangan PDRB Perkapita di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 (Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata	Peringkat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kerinci	24.430	25.525	26.643	26.280	27.102	28.110	29.529	30.686	27.288	5
Perkembangan (%)		4,48	4,38	-1,36%	3,13	3,72	5,05	3,90	3,32	
Merangin	23.676	24.482	25.571	27.882	28.986	30.206	31.362	32.346	28.789	2
Perkembangan (%)		3,40%	4,44%	9,04%	3,97%	4,21%	3,83%	3,14%	4,58%	
Sarolangun	33.789	34.731	36.061	36.983	38.840	40.835	41.862	42.802	38.875	4
Perkembangan (%)		2,75%	3,83%	2,56%	5,03%	5,15%	2,52%	2,25%	3,44%	
Batanghari	39.833	41.293	43.632	38.845	40.108	44.451	45.522	46.321	42.501	9
Perkembangan (%)		3,65%	5,67%	-10,98%	3,25%	10,975	2,41%	1,76%	2,51%	
Muaro Jambi	34.795	35.599	36.949	40.388	41.349	44.026	46.134	48.310	41.381	1
Perkembangan (%)		2,31%	3,79%	9,29%	2,38%	6,48%	4,76%	4,74%	4,82%	
Tanjung Jabung Timur	77.260	78.939	83.968	75.656	74.878	74.536	75.405	78.230	77.427	11
Perkembangan (%)		2,17%	6,39%	-9,89%	-1,03%	-0,45%	1,17%	3,74%	0,58%	
Tanjung Jabung Barat	85.022	89.173	93.524	96.796	96.735	97.796	99.810	102.834	95.586	6
Perkembangan (%)		4,89%	4,88%	3,50%	-0,06%	1,10%	2,06%	3,02%	2,91%	
Tebo	26.936	27.812	29.125	30.157	31.026	32.530	33.548	34.438	30.422	3
Perkembangan (%)		3,26%	4,72%	3,55%	2,88%	4,85%	3,13%	2,68%	3,58%	
Bungo	32.009	32.806	34.011	34.598	35.793	36.977	38.189	38.952	35.542	8
Perkembangan (%)		2,50%	3,66%	1,73%	3,44%	3,34%	3,27%	2,00%	2,85%	
Kota Jambi	29.990	31.212	32.862	30.962	31.816	33.118	34.887	36.052	32.730	7
Perkembangan (%)		4,07%	5,27%	-5,79%	2,77%	4,08%	5,34%	3,33%	2,87%	
Kota Sungai Penuh	47.053	48.788	52.171	47.774	48.884	50.484	52.373	54.443	50.861	10
Perkembangan (%)		3,68%	6,95%	-8,40%	2,32%	3,27%	3,74%	3,96%	2,36%	

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

### **5.1.2 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi dari tahun 2017 hingga 2024. Beberapa daerah mengalami fluktuasi yang signifikan, sementara yang lain cenderung lebih stabil. Misalnya, Kabupaten Kerinci mencatat peningkatan TPAK yang cukup konsisten, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 77,64%. Hal ini mencerminkan potensi pertumbuhan partisipasi kerja yang kuat di wilayah tersebut, meskipun pada beberapa tahun seperti 2019 sempat mengalami penurunan tajam sebesar -6,85%.

Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan tren pertumbuhan yang impresif dengan rata-rata perkembangan tertinggi sebesar 1,93%. Kenaikan tajam terjadi terutama pada tahun 2022 dan 2023, yang masing-masing mencatat pertumbuhan lebih dari 7% dan 10%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam akses atau peluang kerja, kemungkinan didorong oleh ekspansi ekonomi lokal atau proyek-proyek pembangunan yang membuka banyak lapangan kerja. Namun, perlu dicermati bahwa fluktuasi yang terlalu tajam juga dapat menandakan ketidakstabilan pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, daerah seperti Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan rata-rata TPAK sebesar -2,01%. Penurunan ini konsisten dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam partisipasi tenaga kerja, baik karena faktor geografis, pendidikan, maupun keterbatasan lapangan kerja yang tersedia. Wilayah ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan agar kesenjangan tidak semakin melebar dibandingkan daerah lainnya yang mengalami pertumbuhan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang tinggi umumnya mencerminkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan TPAK secara konsisten dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dan efektivitas program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah setempat.

**Table 5.2 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata	Peringkat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kerinci	69,46	71,14	66,26	69,55	70,90	73,53	71,89	77,64	71,30	2
Perkembangan (%)		2,41	-6,85	4,96	1,94	3,70	-2,23	7,99	1,70	
Merangin	69,82	69,62	68,91	70,17	69,85	69,50	71,17	74,73	70,47	3
Perkembangan (%)		-0,29	-1,02	1,83	-0,46	-0,50	2,40	5,00	0,99	
Sarolangun	70,08	67,03	65,20	68,58	64,86	66,74	66,52	68,10	67,14	10
Perkembangan (%)		-4,35	-2,73	5,18	-5,42	2,90	-0,33	2,38	-0,34	
Batanghari	64,39	65,07	60,35	67,02	68,81	63,42	62,01	63,53	64,32	7
Perkembangan (%)		1,06	-7,25	11,05	2,67	-7,83	-2,22	2,45	-0,01	
Muaro Jambi	62,30	63,88	59,16	61,63	62,78	67,21	74,38	70,36	65,21	1
Perkembangan (%)		2,54	-7,38	4,18	1,87	7,06	10,66	-5,41	1,93	
Tanjung Jabung Timur	75,97	71,57	69,84	74,18	71,22	72,85	67,56	65,44	71,08	11
Perkembangan (%)		-5,80	-2,42	6,23	-4,00	2,29	-7,26	-3,14	-2,01	
Tanjung Jabung Barat	70,24	75,35	70,42	74,83	73,89	70	70,17	67,81	71,59	9
Perkembangan (%)		7,29	-6,23	6,26	-1,26	-5,26	0,24	-3,36	-0,33	
Tebo	70,61	70,46	70,17	71,13	70,65	69,02	70,13	69,11	70,16	8
Perkembangan (%)		-0,21	-0,41	1,37	-0,67	-2,31	1,61	-1,45	-0,30	
Bungo	65,89	67,08	63,78	64,89	63,58	67,83	70,3	68,1	66,43	4
Perkembangan (%)		1,81	-4,93	1,74	-2,02	6,67	3,63	-3,14	0,54	
Kota Jambi	64,06	65,11	66,3	64,12	63,12	64,52	64,85	66,4	64,81	5
Perkembangan (%)		1,64	1,82	-3,29	-1,56	2,21	0,51	2,39	0,53	
Kota Sungai Penuh	66,05	71,15	63,18	65,99	64,92	63,02	68,24	66,38	66,12	6
Perkembangan (%)		7,71	-11,20	4,45	-1,62	-2,93	8,27	-2,73	0,28	

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

### **5.1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi dalam periode 2017 hingga 2024. Sebagian besar daerah mengalami fluktuasi yang mencerminkan respons terhadap perubahan ekonomi lokal dan nasional. Misalnya, Kabupaten Kerinci memperlihatkan tren penurunan TPT yang relatif stabil dari 2017 hingga 2021, namun sedikit meningkat kembali setelah 2022. Pola serupa juga tampak di Kabupaten Merangin yang sempat mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, sebelum kemudian kembali menurun secara bertahap.

Beberapa daerah menunjukkan fluktuasi tajam yang patut dicermati, seperti Kabupaten Sarolangun dan Tebo. Sarolangun mencatat lonjakan besar TPT dari tahun 2017 ke 2018 dan kembali meningkat tajam di 2020, mengindikasikan adanya ketidakstabilan pada sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, Tebo sempat mengalami penurunan drastis pada 2022 (-51,24%), namun justru mencatat kenaikan tajam di tahun-tahun berikutnya, seperti 2023 (46,20%). Angka-angka ekstrem ini bisa mengindikasikan pergeseran mendadak dalam struktur ekonomi daerah, migrasi tenaga kerja, atau perubahan kebijakan lokal yang mempengaruhi lapangan kerja.

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi menunjukkan TPT yang cenderung tinggi dibandingkan daerah lain, bahkan mencapai lebih dari 10% pada 2020 dan 2021. Angka tersebut kemungkinan mencerminkan dampak pandemi secara lebih tajam di daerah urban dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor informal dan jasa. Namun, mulai tahun 2022, tren di Kota Jambi menunjukkan penurunan TPT secara konsisten, yang mungkin mencerminkan pemulihan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan signifikan pada 2020 dan 2021, namun kembali naik secara bertahap setelah itu, menunjukkan pola pemulihan yang lebih lambat namun stabil. Secara rata-rata, data menunjukkan bahwa TPT di wilayah Jambi bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi makroekonomi, kebijakan ketenagakerjaan, serta faktor lokal seperti urbanisasi dan struktur industri.

**Table 5.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 (Persen)**

Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata	Peringkat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kerinci	3,26	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63	2,48	2,51	2,62	11
Perkembangan (%)		-15,95	-4,38	-7,25	-4,53	13,36	-5,70	1,21	-3,87	
Merangin	4,1	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69	4,35	4,18	4,27	8
Perkembangan (%)		-15,37	6,05	32,07	-0,62	-2,90	-7,25	-3,91	0,06	
Sarolangun	2,25	4,06	4,09	5,71	5,52	5,22	5,09	5,03	4,62	1
Perkembangan (%)		80,44	0,74	39,61	-3,33	-5,43	-2,49	-1,18	13,24	
Batanghari	3,57	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53	3,85	4,49	4,06	6
Perkembangan (%)		8,40	17,83	-3,07	-3,62	-17,14	9,07	16,62	2,33	
Muaro Jambi	5,39	4,52	5,2	5,43	5,59	5,35	5,4	5,27	5,26	9
Perkembangan (%)		-16,14	15,04	4,42	2,95	-4,29	0,93	-2,41	-0,32	
Tanjung Jabung Timur	2,36	1,8	1,63	1,41	1,56	1,32	1,67	2,06	1,72	10
Perkembangan (%)		-23,73	-9,44	-13,50	10,64	-15,38	26,52	23,35	-1,74	
Tanjung Jabung Barat	3,07	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88	2,95	3,2	2,71	7
Perkembangan (%)		-22,48	7,98	-15,95	17,13	13,83	2,43	8,47	1,63	
Tebo	1,98	2	2,9	2,95	2,83	1,38	1,71	2,5	2,28	2
Perkembangan (%)		1,01	45,00	1,72	-4,07	-51,24	23,91	46,20	8,93	
Bungo	4,89	3,03	3,82	5,94	5,86	5,5	5,23	4,67	4,86	5
Perkembangan (%)		-38,04	26,07	55,50	-1,35	-6,14	-4,91	-10,71	2,92	
Kota Jambi	5,55	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95	8,27	7,38	8,03	3
Perkembangan (%)		15,50	1,87	60,64	1,62	-16,04	-7,60	-10,76	6,46	
Kota Sungai Penuh	4,14	5,13	4	5,56	3	2,49	3,8	4,3	4,05	4
Perkembangan (%)		23,91	-22,03	39,00	-46,04	-17,00	52,61	13,16	6,23	

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

#### **5.1.4 Perkembangan Penduduk Miskin**

Selama delapan tahun terakhir, tren perubahan persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi cenderung fluktuatif. Beberapa daerah seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Sarolangun menunjukkan pola perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan menurun pada angka kemiskinan, meskipun sesekali terjadi peningkatan. Kota Sungai Penuh, misalnya, sempat mencatat peningkatan signifikan sebesar 9,02% pada tahun 2019 dan 8,99% pada 2020, sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, sejumlah wilayah lainnya seperti Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Bungo mengalami perubahan yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Muaro Jambi mencatat lonjakan positif sebesar 18,44% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan tajam pada 2023 sebesar -16,08%. Fenomena serupa juga dialami oleh Bungo, yang mengalami pertumbuhan kemiskinan sebesar 7,11% pada 2021, namun turun drastis pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan ekstrem ini bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang rentan terhadap gangguan eksternal, seperti pandemi atau perubahan harga komoditas utama daerah.

Secara umum, banyak kabupaten/kota mengalami tren negatif dalam perkembangan persentase penduduk miskin, yang berarti upaya pengurangan kemiskinan masih menghadapi tantangan berat. Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Timur, misalnya, menunjukkan tren penurunan berulang hampir setiap tahun, menandakan belum tercapainya kestabilan dalam penanggulangan kemiskinan. Meski terdapat daerah yang mampu mencatat perbaikan pada periode tertentu, rata-rata perkembangan tahunan cenderung menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kota Jambi sebagai pusat ekonomi menunjukkan angka kemiskinan yang relatif tinggi namun lebih terkendali, dengan variasi perubahan yang tidak terlalu ekstrem dibanding kabupaten lainnya.

**Table 5.4 Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024 (Ribuan Jiwa)**

Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata	Peringkat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kerinci	17,62	16,79	17	17,48	18,45	18,2	18,21	16,83	17,57	6
Perkembangan (%)		-4,71	1,25	2,82	5,55	-1,36	0,05	-7,58	-0,57	
Merangin	35,48	33,95	32,88	33,92	35,44	34,14	35,19	33,49	34,31	7
Perkembangan (%)		-4,31	-3,15	3,16	4,48	-3,67	3,08	-4,83	-0,75	
Sarolangun	25,61	25,7	25,39	25,79	27,06	26,23	26,77	26,54	26,13	2
Perkembangan (%)		0,35	-1,21	1,58	4,92	-3,07	2,06	-0,86	0,54	
Batanghari	27,49	27,55	26,53	26,54	27,24	26,24	25,88	23,74	26,40	10
Perkembangan (%)		0,22	-3,7	0,04	2,64	-3,67	-1,37	-8,27	-2,02	
Muaro Jambi	18,28	17,38	16,86	17,3	20,49	20,64	20,83	17,48	18,65	3
Perkembangan (%)		-4,92	-3,99	2,61	18,44	0,73	0,92	-16,08	-0,19	
Tanjung Jabung Timur	27,22	26,99	25,35	24,23	24,42	23,42	23,33	21,86	24,60	11
Perkembangan (%)		-0,84	-6,08	-4,42	0,78	-4,1	0,38	-6,3	-3,05	
Tanjung Jabung Barat	36,33	36,28	35,12	34,78	36,1	33,95	33,61	33,12	34,91	9
Perkembangan (%)		-0,14	-3,2	-0,97	3,8	-5,96	-1,0	-1,46	-1,27	
Tebo	23,33	22,86	22,83	22,47	23,77	22,81	23,47	22,48	23,00	5
Perkembangan (%)		-2,01	-0,13	-1,58	5,79	-4,04	2,89	-4,22	-0,47	
Bungo	20,81	21,11	20,87	22,07	23,64	20,69	20,65	20,04	21,23	4
Perkembangan (%)		1,44	-1,14	5,75	7,11	-12,48	-0,19	-2,95	-0,35	
Kota Jambi	52,08	50,61	48,95	50,44	54,43	50,4	50,09	47,25	50,53	8
Perkembangan (%)		-2,82	-3,28	3,04	7,91	-7,4	-0,62	-5,67	-1,26	
Kota Sungai Penuh	2,46	2,48	2,55	2,78	3,03	2,64	2,66	2,6	2,65	1
Perkembangan (%)		0,81	2,82	9,02	8,99	-12,87	0,76	-2,26	1,04	

### **5.1.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil di hampir semua kabupaten dan kota selama periode 2017 hingga 2024. Kerinci, misalnya, mengalami peningkatan bertahap dari tahun ke tahun, dengan angka IPM pada 2024 mencapai 73,11, yang mencerminkan pertumbuhan yang konsisten di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Begitu pula dengan Merangin yang mengalami kenaikan IPM hingga mencapai 71,66 pada 2024, meski lebih lambat dibandingkan dengan Kerinci, namun tetap menunjukkan perkembangan positif.

Di kabupaten lain seperti Sarolangun dan Batanghari, peningkatan IPM juga cukup stabil. Sarolangun mencatatkan peningkatan IPM yang lebih signifikan pada 2021 dan 2022, sementara Batanghari mengalami kenaikan bertahap pada 2022 dan 2023. Kedua daerah ini menunjukkan perhatian terhadap pengembangan sektor-sektor penting yang mendukung kualitas hidup masyarakat, meskipun ada fluktuasi kecil dalam perkembangan tersebut.

Beberapa kabupaten seperti Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Muaro Jambi mengalami peningkatan yang lebih besar pada tahun 2022 dan 2023, dengan IPM mencapai 71,91 pada 2024. Tanjung Jabung Timur, meskipun pada posisi lebih rendah, terus mencatatkan kenaikan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh tetap menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Jambi. Kota Jambi, sebagai ibu kota provinsi, mengalami peningkatan IPM yang stabil hingga 81,04 pada 2024. Kota Sungai Penuh juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan angka IPM 77,4 pada 2024. Keduanya mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, yang menjadi model bagi daerah lainnya. Dengan adanya perhatian lebih pada daerah-daerah yang masih tertinggal, diharapkan seluruh kabupaten dan kota dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Dengan terus meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, Provinsi Jambi dapat lebih mendekati tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi.

**Table 5.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi Tahun 2017-2024**

Kabupaten/Kota	Tahun								Rata-rata	Peringkat
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Kerinci	70,03	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99	72,54	73,11	71,48	8
Perkembangan (%)		0,80	0,51	0,37	0,34	0,76	0,76	0,79	0,62	
Merangin	68,3	68,81	69,07	69,19	69,53	69,68	70,81	71,66	69,63	5
Perkembangan (%)		0,75	0,38	0,17	0,49	0,22	1,62	1,20	0,69	
Sarolangun	69,03	69,41	69,67	69,86	70,25	70,89	71,29	72,01	70,30	9
Perkembangan (%)		0,55	0,37	0,27	0,56	0,91	0,56	1,01	0,61	
Batanghari	68,92	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51	71,02	71,67	70,13	11
Perkembangan (%)		0,59	0,49	0,24	0,39	0,57	0,72	0,92	0,56	
Muaro Jambi	67,86	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18	71,04	71,91	69,63	2
Perkembangan (%)		0,71	0,98	0,25	0,53	0,91	1,23	1,22	0,83	
Tanjung Jabung Timur	62,61	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77	66,65	67,54	64,89	1
Perkembangan (%)		1,13	0,95	0,80	0,74	1,32	1,34	1,34	1,09	
Tanjjung Jabung Barat	66,15	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79	69,35	69,93	68,07	3
Perkembangan (%)		1,48	0,61	0	0,92	0,92	0,81	0,84	0,80	
Tebo	68,16	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78	70,63	71,32	69,50	7
Perkembangan (%)		0,75	0,51	0,17	0,30	0,62	1,22	0,98	0,65	
Bungo	69,04	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55	71,06	71,92	70,24	10
Perkembangan (%)		0,55	0,63	0,09	0,33	0,57	0,72	1,11	0,59	
Kota Jambi	76,74	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58	80,15	81,04	78,83	4
Perkembangan (%)		0,87	1,10	0,14	0,96	0,58	0,72	1,11	0,78	
Kota Sungai Penuh	73,75	74,67	75,36	75,42	75,7	76,17	76,65	77,4	75,64	6
Perkembangan (%)		1,25	0,92	0,08	0,37	0,62	0,63	0,98	0,69	

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

## 5.2 Hasil Regresi Data Panel

Pada sub bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua terkait bagaimana pengaruh PDRB perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam menjawab rumusan masalah yang kedua digunakan alat analisis kuantitatif yaitu regresi data panel dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*, dimana *time series* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurun waktu 2017-2024 dan *cross section* objeknya berupa 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

### 5.2.1 Pemilihan Model Terbaik

Untuk mendapatkan model pengujian data panel terbaik maka dilakukan tiga tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier. Adapun hasil Pengujiannya yaitu sebagai berikut:

#### 1. Uji Chow

Uji Chow yaitu pengujian untuk menentukan model yang tepat untuk digunakan dalam mengestimasi data panel dengan melihat stabilitas intersep dalam model. Pengujian ini dilakukan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Common Effect Model (CEM). Adapun hipotesis yang digunakan pada Uji Chow yaitu sebagai berikut:

- a. Jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya model FEM lebih baik dari model CEM.
- b. Jika  $p\text{-value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya model CEM lebih baik dari model FEM.

**Table 5.6 Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	107.671789	(10,73)	0.0000
Cross-section Chi-square	242.599495	10	0.0000

Sumber: Data diolah (Eviews 13), 2025

Dapat dilihat pada tabel 5.6 hasil Uji Chow yang menunjukkan bahwa nilai Prob cross section Chi-square yaitu  $0,0000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$

diterima, sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Setelah dilakukan Uji Chow maka dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk melihat model terbaik diantara FEM dan REM.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM. Uji ini pada dasarnya melihat apakah terdapat korelasi anatar efek individudengan variabel independennya yang mendasari perbedaan FEM dan REM. Jika  $p\text{-value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya model FEM lebih baik dari model REM. Berikut hasil Uji Hausman yaitu:

**Table 5.7 Hasil Uji Hausman**

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	55.918547	4	0.0000

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025

Dapat dilihat pada tabel 5.7 hasil Uji Hausman yang menunjukkan bahwa niali signifikan Prob Cross-section yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga model terbaik yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Setelah dilakukan Uji Hausman, tidak perlu lagi uji Lagrange Multiplier karena uji digunakan untuk memilih CEM dan REM. Dengan demikian model data panel yang digunakan pada penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

### 5.2.2 Hasil Pengujian Estimasi Model FEM

Hasil estimasi menunjukkan bahwa FEM memberikan nilai R-squared yang lebih tinggi dan signifikan secara statistik dibandingkan model lain, yang menandakan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Selain itu, pengujian melalui uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas di bawah tingkat signifikansi 5%, sehingga menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa FEM lebih tepat digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM), Dengan demikian, penggunaan FEM dalam penelitian ini dianggap sesuai.

**Table 5.8 Hasil Estimasi Fixed Effect (FEM)**

Dependent Variable: IPM?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 04/29/25 Time: 19:17  
 Sample: 2017 2024  
 Included observations: 8  
 Cross-sections included: 11  
 Total pool (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.59649	2.655488	24.70223	0.0000
PDRB?	0.234220	0.025954	9.024485	0.0000
TPAK?	0.025018	0.031925	0.783656	0.4358
TPT?	0.187433	0.102325	1.831751	0.0711
PM?	-0.310834	0.071995	-4.317415	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	2.682497			
_MERANGIN--C	5.563346			
_SAROLANGUN--C	1.326663			
_BATANGHARI--C	0.417271			
_MUAROJAMBI--C	-2.372220			
_TANJABTIM--C	-13.27626			
_TANJABBAR--C	-11.26935			
_TEBO--C	1.689638			
_BUNGO--C	0.374423			
_KOTAJAMBI--C	18.17910			
_KOTASUNGAIPENU				
H--C	-3.315112			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.966890	Mean dependent var	70.76148	
Adjusted R-squared	0.960540	S.D. dependent var	3.710442	
S.E. of regression	0.737059	Akaike info criterion	2.381735	
Sum squared resid	39.65771	Schwarz criterion	2.804008	
Log likelihood	-89.79633	Hannan-Quinn criter.	2.551858	
F-statistic	152.2702	Durbin-Watson stat	0.723878	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025.

Berdasarkan hasil regresi data panel pada tabel 5.8 dapat dilihat antara variabel independen terhadap variabel terikat tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PM_{it} + \mu_{it} \dots\dots(5.1)$$

$$IPM_{it} = 65.59649 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it} \dots\dots\dots(5.2)$$

Berdasarkan hasil analisis data dan persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nilai konstanta sebesar 65,59649 yang artinya bila diasumsikan PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin bernilai sama dengan 1 maka Indeks Pembangunan Manusia akan bernilai sebesar 65,59649. Berikut model persamaan untuk tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

**Tabel 5.9 Persamaan Regresi Data Panel**

Wilayah	Persamaan Regresi
Kerinci	$65.59649 + 2.682497 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Merangin	$65.59649 + 5.563346 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Sarolangun	$65.59649 + 1.326663 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Batanghari	$65.59649 + 0.417271 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Muaro Jambi	$65.59649 - 2.372220 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Tanjung Jabung Timur	$65.59649 - 13.27626 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Tanjung Jabung Barat	$65.59649 - 11.26935 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$

Tebo	$65.59649 + 1.689638 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Bungo	$65.59649 + 0.374423 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Kota Jambi	$65.59649 + 18.17910 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$
Kota Sungai Penuh	$65.59649 - 3.315112 + 0.234220PDRB_{it} + 0.025018TPAK_{it} + 0.187433TPT_{it} - 0.310834PM_{it}$

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025.

Berdasarkan Tabel 5.12 Kota Jambi memiliki efek individu terbesar diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi yaitu sebesar 83.775590 yang artinya apabila diasumsikan PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin bernilai sama dengan nol maka Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi sebesar 83.775590 dan mengalami peningkatan. Sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi dengan efek individual terkecil yaitu sebesar 52.320230 yang artinya apabila diasumsikan PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin bernilai sama dengan nol maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 52.320230 atau bernilai negatif dan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia yang berada di Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tebo, Bungo dan Kota Jambi bernilai positif dan mengalami peningkatan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh bernilai negatif dan mengalami penurunan.

### 5.2.3 Uji Statistik

#### 1. Uji F

Uji F atau uji simultan berguna untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependennya dalam model regresi. Dalam pengujiannya apabila nilai Prob.Statistiknya  $< 0,05$  maka variabel

independennya secara bersama-sama atau simultan akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa nilai Prob (F-Statistik) sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya semua variabel independen (PDRB perkapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan penduduk miskin) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia).

## 2. Uji t

Uji t atau uji parsial berguna untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengujiannya apabila nilai Prob.statistiknya  $<$  nilai signifikansi pada  $\alpha$  1%,  $\alpha$  5%,  $\alpha$  10% maka variabel independennya secara parsial akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t yaitu sebagai berikut:

**Table 5.10 Hasil Uji t**

No	Variabel	t-statistic	Prob
1	PDRB Perkapita	9.024485	0.0000*
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0.783656	0.4358
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.831751	0.0711**
4	Penduduk miskin	-4.317415	0.0000*

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025

Keterangan:

- \* = signifikan pada  $\alpha = 1\%$
- \*\* = signifikan pada  $\alpha = 10\%$

Jika dilihat hasil uji t pada tabel 5.10 masing-masing variabel menunjukkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel PDRB perkapita memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha$  1% ( $0,0000 < 0,01$ ). Maka dapat disimpulkan variabel PDRB perkapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih besar dari taraf signifikansi  $\alpha$  10% ( $0.4358 > 0,1$ ). Maka dapat disimpulkan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha$  10% ( $0.0711 < 0,1$ ). Maka dapat disimpulkan variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Variabel Penduduk miskin memiliki nilai probabilitas (t-statistik) lebih kecil dari taraf signifikansi  $\alpha$  1% ( $0,0000 < 0,01$ ). Maka dapat disimpulkan variabel Penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik model regresi tersetimasi dalam menentukan ketetapan model regresi. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berada direntang nol dan satu. Semakin mendekati satu, maka model regresi semakin baik. Berdasarkan hasil pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi pada R-Squared sebesar 0.966890 atau sebesar 96%. Artinya PDRB perkapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk miskin mampu menjelaskan dengan baik terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 96% sedangkan 4% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

#### **5.2.4 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam model regresi. Salah satu metode sederhana yang digunakan adalah melihat nilai korelasi Pearson antar variabel independen. Apabila terdapat korelasi yang sangat tinggi, biasanya nilai matrik korelasi di atas 0,90 maka hal tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya multikolinearitas. Berikut ini hasil Uji Multikolinearitas yaitu:

**Table 5.11 Hasil Uji Multikolinearitas**

	PDRB (X1)	TPAK (X2)	TPT (X3)	PM (X4)
X1	1.000000	0,270557	-0,367537	0,036899
X2	0,270557	1.000000	-0,508188	0,027275
X3	-0,367537	-0,508188	1.000000	0,414035
X4	0,036899	0,027275	0,414035	1.000000

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025

Dapat dilihat tabel 5.8 bahwa semua variabel tidak terkena multikoline karena nilai matrik korelasi antar variabel kurang dari 0,90. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk memverifikasi apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residul satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dan residul satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan uji Breusch-Pagan atau uji White (d disesuaikan dengan metode yang digunakan), diperoleh hasil bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model Berikut ini hasil uji heterokedastisitas yaitu:

**Table 5.11 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.820484	1.210020	-0.678075	0.4999
PDRB_X1	0.009350	0.011826	0.790615	0.4317
TPAK_X2	-0.001729	0.014547	-0.118825	0.9057
TPT_X3	0.050816	0.046626	1.089867	0.2794
PM_X4	0.032222	0.032806	0.982190	0.3293

Sumber: Data Diolah (Eviews 13), 2025.

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai prob pada semua variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti sudah terpenuhinya syarat hetrokedastisitas.

## **5.3 Hasil Penelitian**

### **5.3.1 Pengaruh PDRB perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa PDRB perkapita memperoleh nilai koefisien sebesar 0,234220 dan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,1$  yang menjelaskan bahwa setiap PDRB perkapita mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 0,234220 dengan asumsi variabel dianggap tetap. Dengan demikian PDRB perkapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2024.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Amrullah (2022) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kenaikan PDRB mencerminkan sedang terjadi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan persediaan sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan manusia terutama dalam bentuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mengurangi penangguran dan meningkatkan produktifitas, yang pada gilirannya meningkatkan total produksi dan pendapatan perkapita, sehingga penduduk akan memiliki lebih banyak pilihan untuk mencapai standar hidup yang lebih baik dan kualitas pembangunan manusia pun meningkat.

Temuan ini juga sejalan dengan teori kuncuro yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan ekonomi suatu wilayah terjadi ketika tingkat kegiatan ekonomi melebihi pencapaian masa sebelumnya. Sehingga pertumbuhan ekonomi fokus pada perbaikan kualitas dan jumlah aktifitas ekonomi wilayah tersebut yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut sehingga PDRB akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

### **5.3.2 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memperoleh nilai koefisien sebesar 0.025018 dan nilai probabilitas sebesar  $0.4358 > 0,1$  yang menjelaskan bahwa setiap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 0.025018 dengan asumsi variabel dianggap tetap. Dengan demikian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2024.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Endang & Saiful (2024) yang menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak memiliki hubungan langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menjelaskan bahwa keberadaan angkatan kerja yang besar belum tentu disertai dengan kualitas kerja yang memadai, seperti keterampilan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas sosial. Oleh karena itu, meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tinggi, dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia menjadi terbatas jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cukup tinggi, hal tersebut tidak secara otomatis mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu alasan yang mungkin mendasari hal ini adalah karena sebagian besar tenaga kerja masih terserap di sektor informal atau pekerjaan dengan pendapatan rendah, yang kontribusinya terhadap kemajuan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat sangat terbatas. Padahal, ketiga aspek tersebut merupakan indikator utama dalam pengukuran IPM. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingginya partisipasi dalam pasar kerja tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan, terlebih jika tidak diiringi dengan akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus pembangunan seharusnya tidak hanya tertuju pada peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, melainkan juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja agar mampu berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara menyeluruh.

### **5.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memperoleh nilai koefisien sebesar 0.187433 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0711 < 0,1$  yang menjelaskan bahwa setiap Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 0.187433 dengan asumsi variabel dianggap tetap. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2024.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Doni Prahasta et al. (2022) yang menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan kontekstual, Salah satunya adalah bahwa daerah dengan nilai IPM tinggi yang berarti memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan cenderung menjadi tujuan migrasi penduduk usia kerja dari daerah lain. Migrasi ini meningkatkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja, sehingga menyebabkan tingkat pengangguran terbuka meningkat meskipun kualitas hidup secara umum tetap baik. Selain itu, peningkatan angka pengangguran terbuka juga dapat terjadi akibat meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi. Masyarakat yang memilih melanjutkan pendidikan cenderung menunda masuk ke pasar kerja, sehingga tercatat sebagai pengangguran, padahal dalam jangka panjang kontribusinya terhadap pembangunan manusia tetap positif.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pengangguran terbuka tidak selalu berdampak negatif terhadap pembangunan manusia, terutama pada wilayah yang sudah memiliki basis pendidikan dan kesehatan yang kuat. Hasil ini selaras dengan pandangan Todaro dan Smith (2011), yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan, pengangguran jangka pendek dapat muncul sebagai konsekuensi dari peningkatan partisipasi pendidikan dan pergeseran struktur

ekonomi. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pembangunan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dinamika ini secara lebih menyeluruh, agar peningkatan IPM tetap berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif.

Namun demikian, meskipun hasil analisis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara TPT terhadap IPM, hal ini tetap perlu ditafsirkan secara hati-hati. Angka pengangguran yang tinggi tetap menjadi indikator adanya ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, meskipun IPM dapat meningkat karena faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah tetap perlu mengantisipasi dampak jangka panjang dari tingginya angka pengangguran terbuka. Upaya seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja produktif, dan penciptaan lapangan kerja baru tetap menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan.

#### **5.3.4 Pengaruh Penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa Penduduk miskin memperoleh nilai koefisien sebesar  $-0.310834$  dan nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$  yang menjelaskan bahwa setiap penduduk miskin mengalami kenaikan 1% maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar  $-0.310834$  dengan asumsi variabel dianggap tetap. Dengan demikian penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2017-2024. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, maka semakin rendah pula capaian IPM suatu daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh sejumlah hasil penelitian terdahulu. Penelitian Fransimeon (2023) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Sumatera. Senada dengan itu, studi dari Rahmawati (2019) juga membuktikan bahwa semakin tinggi angka kemiskinan di suatu daerah, maka capaian IPM

cenderung menurun, khususnya pada indikator pendidikan. Sementara itu, Mirza (2011) dalam kajiannya di Pulau Jawa menemukan bahwa pengurangan kemiskinan berdampak langsung terhadap peningkatan pengeluaran per kapita dan rata-rata lama sekolah. Hasil serupa juga disampaikan oleh Prameswari et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki kontribusi negatif yang signifikan dalam pembangunan manusia di daerah-daerah tertinggal.

Kemiskinan berkorelasi erat dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga miskin umumnya menghadapi kendala biaya untuk menyekolahkan anak, mengakses fasilitas kesehatan yang layak, maupun memenuhi standar hidup minimum. Akibatnya, komponen-komponen penyusun IPM seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita turut mengalami tekanan. Hal ini memperjelas bahwa strategi pengentasan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM harus dibarengi dengan program yang menysasar kelompok masyarakat miskin secara langsung. Intervensi yang bersifat struktural, seperti perluasan akses pendidikan gratis, layanan kesehatan bersubsidi, serta pemberdayaan ekonomi produktif bagi rumah tangga miskin, dapat menjadi solusi jangka panjang. Dengan mengurangi beban kelompok rentan, maka indikator-indikator IPM akan lebih mudah ditingkatkan secara merata di berbagai daerah. Kesimpulannya, keberhasilan pembangunan manusia sangat bergantung pada keberhasilan menekan angka kemiskinan.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan**

Mengingat PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan ekonomi tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan PDRB secara kuantitatif, tetapi juga secara inklusif. Salah satu langkah strategis adalah memperkuat sektor-sektor produktif yang padat karya dan memiliki efek berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendapatan daerah yang meningkat dari PDRB sebaiknya dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur dasar yang secara langsung mempengaruhi IPM. Pemerintah juga dapat mengembangkan kerja sama antara sektor publik dan swasta guna memperluas cakupan pembangunan ekonomi yang berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup penduduk (Amrullah, 2022)

Temuan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak akan optimal tanpa penanganan serius terhadap isu ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pemerintah perlu merancang program pelatihan keterampilan kerja (vocational training), penguatan UMKM, serta penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Selain itu, perlindungan sosial dan program bantuan yang bersifat produktif harus ditingkatkan, agar kelompok rentan mampu keluar dari perangkap kemiskinan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pendekatan berbasis data juga penting agar program bantuan tepat sasaran dan mampu menekan ketimpangan antarwilayah. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa intervensi tersebut memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan dan pengangguran (Sembiring, 2020)

Di sisi lain, karena variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPM, maka kebijakan ketenagakerjaan ke depan perlu lebih difokuskan pada kualitas partisipasi, bukan hanya kuantitasnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa angkatan kerja yang masuk pasar kerja memiliki keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Artinya, reformasi kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja perlu diarahkan agar selaras dengan perkembangan pasar kerja lokal. Dengan cara ini, peningkatan TPAK dapat lebih berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan secara tidak langsung memperkuat capaian IPM (Faizin, 2021)

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini, kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi perlu diarahkan secara lebih terintegrasi dan berbasis data. Pendekatan yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia

akan mendorong peningkatan IPM secara lebih merata di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga diharapkan membangun sinergi antarinstansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelaksanaan program pembangunan dapat saling mendukung dan berkelanjutan. Kedepannya penyusunan rencana pembangunan harus mempertimbangkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pencapaian kualitas hidup masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Hal ini penting agar capaian IPM tidak bersifat semu, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan begitu, Provinsi Jambi dapat mewujudkan pembangunan manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Fransimeon, 2023).